



Tanggal	<b>11 Desember 2023</b>	Media	<b>Haluan</b>
Kategori	<b>KEAMANAN, HUKUM &amp; POLITIK</b>	Jurnalis	<b>h/mta</b>

Harian Umum Independen

# HALUAN

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KLIPING KORAN

HARI : Senin

TANGGAL : 11 Desember 2023

## Bawaslu Pariaman

### Siasati Pemilih Punya Hak Suara Lebih

**PARIAMAN, HALUAN** - Bawaslu Pariaman menggelar rapat koordinasi pengawasan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) untuk persiapan pemilu 2024, Jumat (8/12).

Kegiatan itu turut mengundang KPU Kota Pariaman beserta panwaslu kecamatan, PPK dan instansi terkait daerah tersebut yang meliputi Dinas Dukcapil, Kodim 0308, kepala Lapas kelas II B dan polres.

Ketua Bawaslu Kota Pariaman Riswan mengatakan, dalam rapat tersebut, pihaknya menekankan level pengawasan DPTb dan DPK kepada instansi terkait yang dihadirkan. Menurutnya, ada sejumlah masalah yang perlu dicarikan solusi bersama agar KPU bisa mengambil tindakan.

"Jadi dari hasil pengawasan yang kita temukan itu dikoordinasikan kepada masing-masing stakeholder terutama KPU. Ternyata banyak persoalan juga terkait DPTb dan itulah yang perlu dicarikan jalan keluarnya bagaimana KPU menyikapi ini," katanya.

Riswan menyebut, selain KPU, data pemilih dari Dinas Dukcapil juga sangat diperlukan untuk memastikan tidak ada pemilih yang berpeluang memiliki dua hak suara di hari pencoblosan mendatang.

"Data pemilih ini bukan hanya KPU saja yang bisa menyelesaikan, kita berharap juga kepada Dukcapil. Karena data dari mereka dan KPU ternyata masih banyak ditemukan DPT yang belum melakukan perekaman," sambungnya.

Selain itu, ia mengatakan pihak Dinas Dukcapil sudah memiliki progres yang baik terkait pendataan pemilih yang pindah domisili serta rekening data. Data tersebut, katanya berguna untuk menyaring data DPT yang berpeluang menjadi DPTb atau dihapuskan dari tempat pemilihan domisili sebelumnya.

"Progres yang telah dilakukan oleh Disdukcapil Kota Pariaman sudah cukup bagus, kalau dipersentasekan 90 persen. Kita berharap menjelang hari H, pemilih yang belum melakukan perekaman sudah tuntas semuanya," katanya.

Terkait DPTb, Riswan mengkhawatirkan ada pemilih yang berpeluang menggunakan dua hak suara di domisili asal dan tempat pemilihan baru. Ia berharap, hal tersebut tidak terjadi karena pihaknya akan aktif melakukan pengawasan dan koordinasi dengan KPU dan Dukcapil.

"Termasuk DPTb ini yang diambil dari surat suara cadangan dengan jumlah dua persen dari DPT, kita khawatir surat suara yang ditunjukkan tidak mencukupi, makanya perlu pengawasan dan membandingkannya dengan data KPU," ujarnya.

Kendati begitu, Riswan mengungkap dari hasil koordinasi jumlah DPTb tidak begitu banyak. Jika jumlah DPTb pada suatu TPS melebihi, katanya, pihak penyelenggara pemilu akan mensiasati dari surat suara dari TPS lain.

"Ada juga kemungkinan pemilih golput, surat suaranya bisa dimanfaatkan untuk DPTb ini," terangnya. (h/mta)

67

